



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**



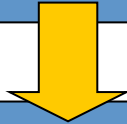
***“Peran TKPK Kabupaten/Kota
dalam Penggulangan Kemiskinan
pasca UU 6 Tahun 2014 tentang Desa”***

Ir. TARMIZI A. KARIM, M.Sc

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



Tujuan RPJMN Ke-2
Tahun 2010-2014



Pemantapan dan Penataan:
Kualitas SDM, IPTEK dan
Daya Saing Perekonomian



Visi Indonesia 2014,
Misi Pemb.Nasional
2010 - 2014

5 Agenda Pokok
Pembangunan Nasional
2010-2014

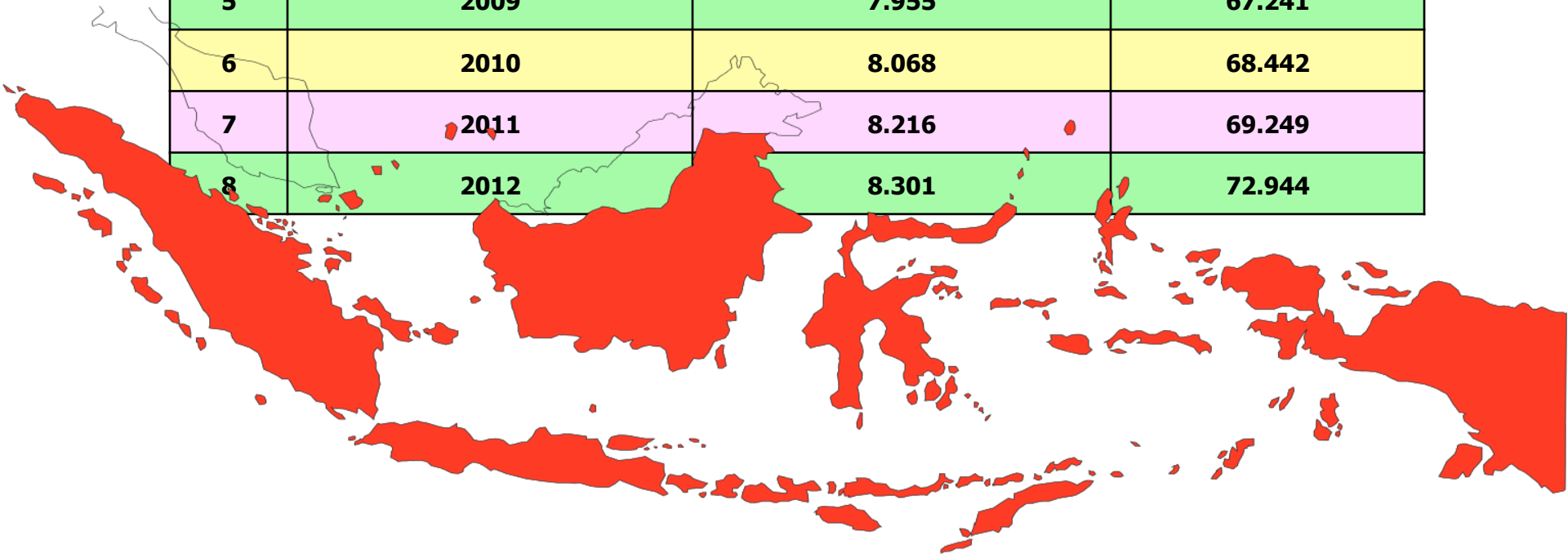
- Pemb. Ekonomi & Kesra
- Tata Kelola Pemerintahan
- Pemantapan Pilar Demokrasi
- Hukum & Pemberantasan Korupsi
- Pemb. Inklusif & Berkeadilan

- 11 Bid. Prioritas:
- Reformasi Birokrasi dan Tata kelola
 - Pendidikan
 - Kesehatan
 - Penanggulangan Kemiskinan**
 - Ketahanan Pangan
 - Infrastruktur
 - Iklm Investasi dan Iklm Usaha**
 - Energi
 - Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
 - Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik
 - Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

TARGET PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN TAHUN 2010-2014 SEBESAR 8-10%

TINGKAT PERKEMBANGAN DESA/KELURAHAN SECARA NASIONAL DARI TAHUN 2001-2012

NO	TAHUN	JUMLAH	
		KELURAHAN	DESA
1	2001	6.694	61.561
2	2003	6.918	62.080
3	2005	7.113	62.806
4	2008	7.878	65.189
5	2009	7.955	67.241
6	2010	8.068	68.442
7	2011	8.216	69.249
8	2012	8.301	72.944



JUMLAH PENDUDUK MISKIN, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DAN GARIS KEMISKINAN

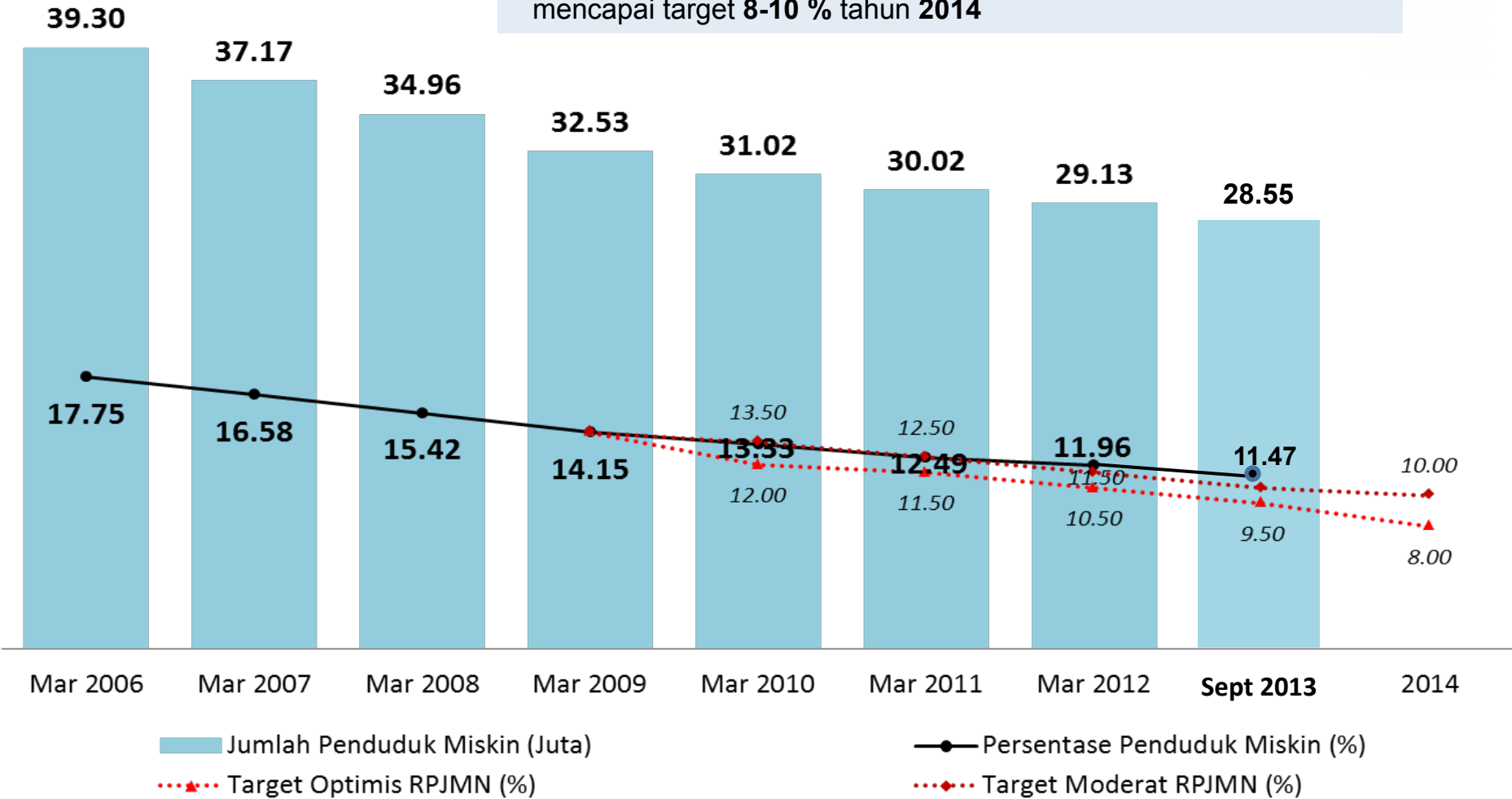
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin			Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/Bulan)	
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa
2004	11.37	24.78	36.15	12.13	20.11	16.66	143 455,00	108 725,00
2005	12.40	22.70	35.10	11.68	19.98	15.97	165 565,00	117 365,00
2006	14.49	24.81	39.30	13.47	21.81	17.75	174 290,00	130 584,00
2007	13.56	23.61	37.17	12.52	20.37	16.58	187 942,00	146 837,00
2008	12.77	22.19	34.96	11.65	18.93	15.42	204 895,99	161 830,79
2009	11.91	20.62	32.53	10.72	17.35	14.15	222 123,10	179 834,57
2010	11.10	19.93	31.02	9.87	16.56	13.33	232 989,00	192 353,83
Mar-11	11.05	18.97	30.02	9.23	15.72	12.49	253 015,51	213 394,51
Sep-11	10.95	18.94	29.89	9.09	15.59	12.36	263 593,84	223 180,69
Mar-12	10.65	18.49	29.13	8.78	15.12	11.96	267 407,53	229 225,78
Sep-12	10.51	18.09	28.59	8.60	14.70	11.66	277 381,99	240 441,35
Mar-13	10.33	17.74	28.07	8.39	14.32	11.37	289 041,91	253 273,31
Sept-13	10.63	17.92	28.55	8.52	14.42	11.47	308 826	275 779



TARGET DAN CAPAIAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN



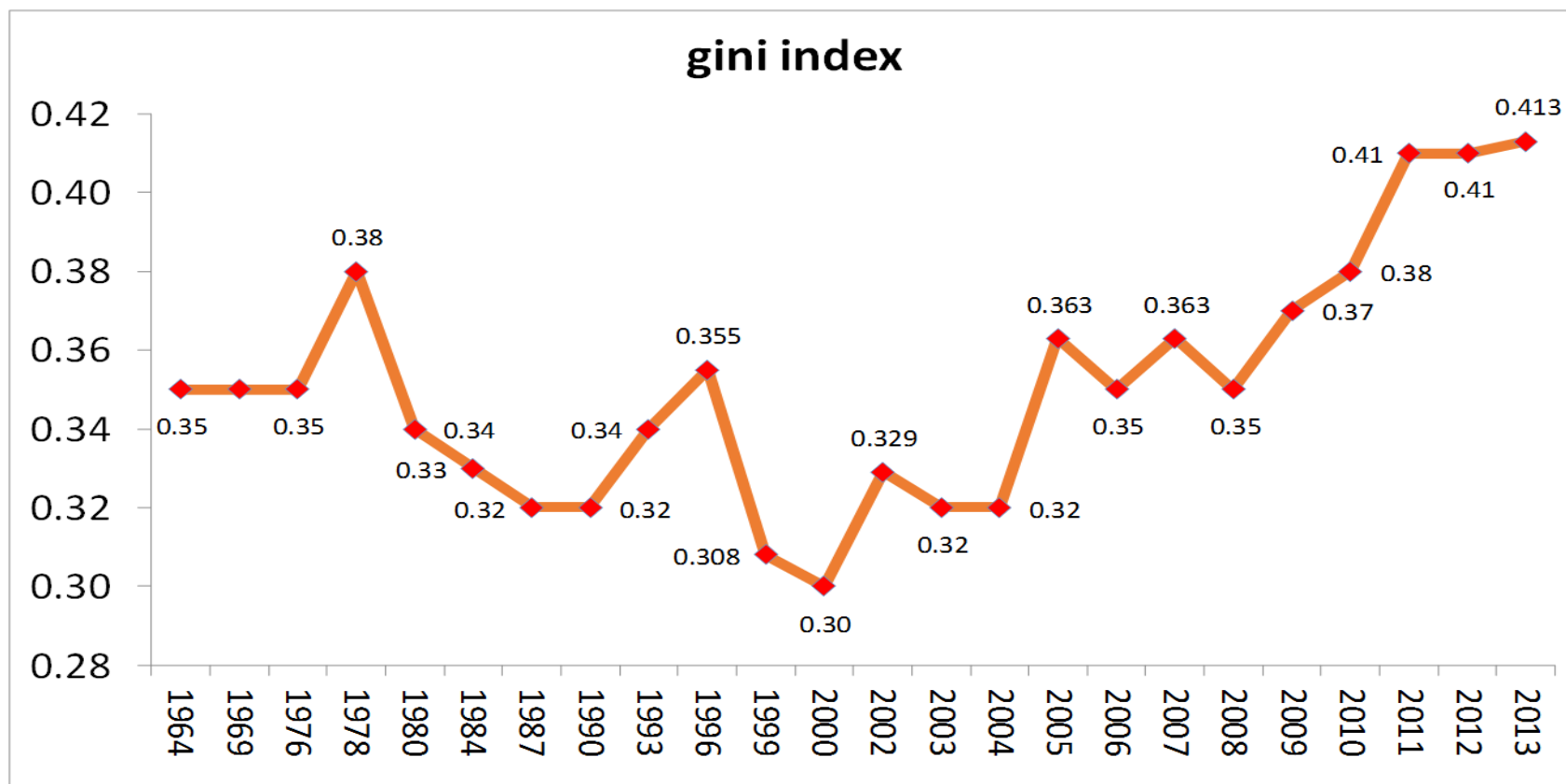
- Tahun 2006-2013, jumlah maupun persentase penduduk miskin nasional terus menurun.
- Percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan untuk mencapai target **8-10 %** tahun **2014**





GINI RATIO INDONESIA

Ketimpangan “pendapatan” memburuk

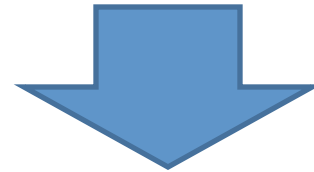


Sources: 1. BPS for 1996, 1999, 2002, 2005, 2007-2013 see http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=6; for 2004 and 2006 see BPS, Key Indicators of Indonesia, Special Edition 2007.

2. Satish Chandra Mishra, "Economic Inequality in Indonesia: Trends, Causes and Policy Response, Strategic Asia, March 2009: 17 for 1976, 1984, 1987, 1990, and 1993.



**UU 32 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**



KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



**UU 6 TAHUN 2014
TENTANG
DESA**



INSTRUMEN KEBIJAKAN DALAM Mendukung PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2010
tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2010;



Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2010
tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

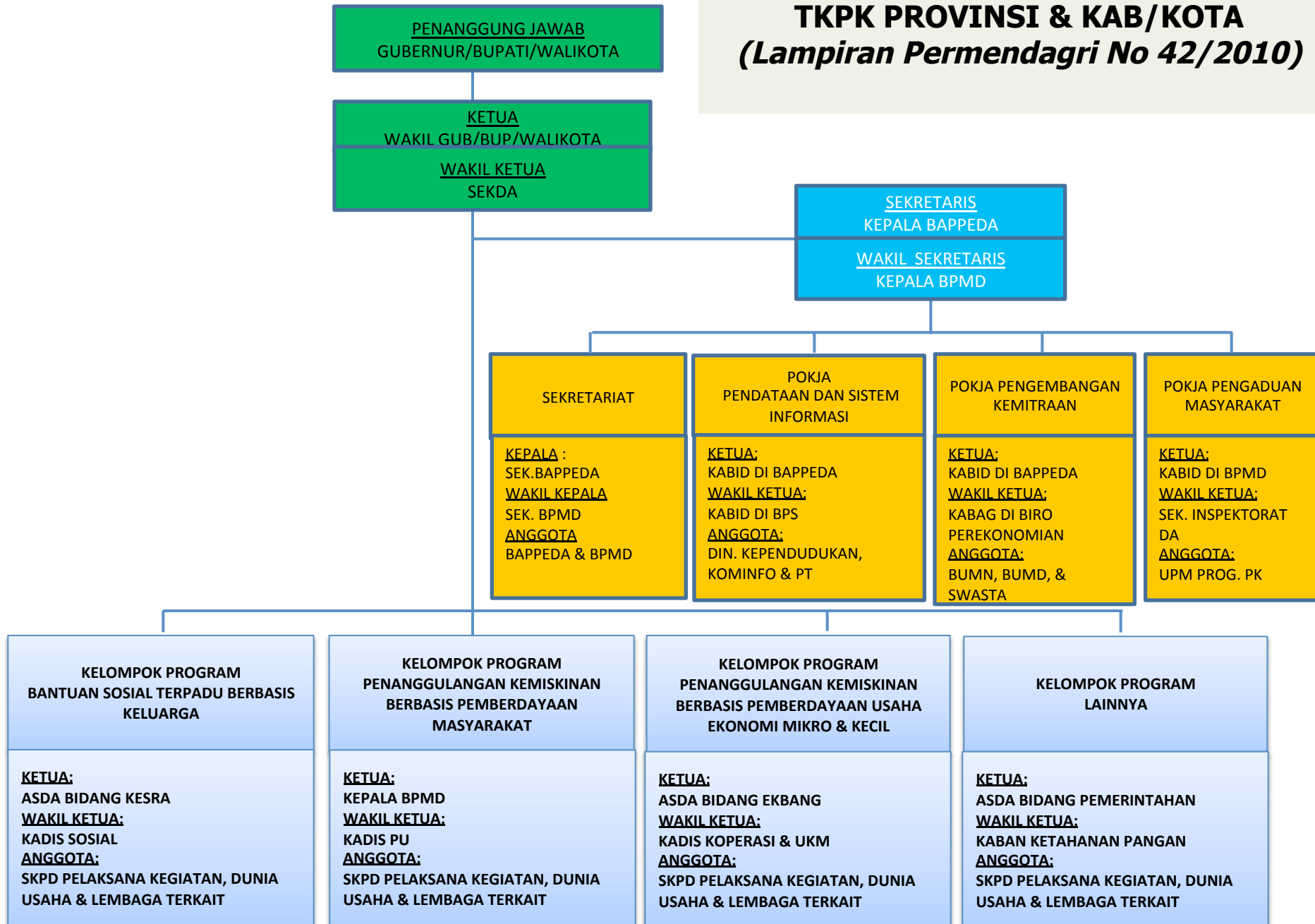


Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;



Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 Tahun 2010
tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

STRUKTUR TKPK PROVINSI & KAB/KOTA (Lampiran Permendagri No 42/2010)





UNDANG-UNDANG TENTANG DESA

- 1. MENGATASI BERBAGAI PERMASALAHAN YANG ADA DI DESA BAIK DIBIDANG SOSIAL- BUDAYA DAN EKONOMI**
- 3. MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA.**
- 4. MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA**
- 5. MEMPERKUAT DESA SEBAGAI ENTITAS MASYARAKAT YANG MANDIRI**
- 6. MENINGKATKAN PERAN APARAT PEMERINTAH DESA SEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN**

PNPM MANDIRI PERDESAAN



KESEJAHTERAAN DAN
KEMANDIRIAN
MASYARAKAT

KERANGKA KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

- **Keberpihakan kepada Orang miskin**; Dalam setiap tahapan kegiatan, termasuk pemanfaatannya diutamakan kepada orang miskin
- **Transparansi**; masyarakat harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan ini serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.
- **Partisipasi**; masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelestariannya.
- **Musyawarah**; memilih sesuatu yang menjadi prioritas, setiap pengambilan keputusan di desa maupun antar desa dilakukan secara musyawarah berdasarkan pada prioritas kebutuhan nyata.
- **Desentralisasi**; masyarakat memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang luas untuk mengelola kegiatan secara mandiri dan partisipatif tanpa intervensi negatif dari luar.
- **Akuntabilitas**; setiap pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak yang berkompeten
- **Keberlanjutan**; dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan harus selalu mempertimbangkan sistem pelestariannya.
- **Kesetaraan Gender**; dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan, perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.

Langkah strategis untuk memperkuat dan mengoptimalkan kelembagaan TKPK Daerah

1. TKPK Daerah yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya serta melakukan peningkatan kapasitas manajerial pengelola Sekretariat TKPK melalui pelatihan/ bimbingan teknis;
2. Mengalokasikan anggaran melalui APBD dalam upaya menguatkan kelembagaan dan operasionalisasi TKPK Daerah;
3. Melakukan Rapat Koordinasi secara periodik dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seluruh program penanggulangan kemiskinan;
4. Para Ketua TKPK Kabupaten dan Kota segera mengambil langkah-langkah:
 - a. melakukan konsolidasi internal antar stake holder di wilayahnyamasing-masing;
 - b. menyusun rencana aksi penanggulangan kemiskinan dengan memperhatikan dan menyesuaikan kearifan lokal;
 - c. segera menyusun SKPD untuk diintegrasikan ke dalam PRJMD Kabupaten/Kota, agar-program-program penanggulangan dapat dianggarkan;
 - d. Menyusun laporan secara berkala hasil pelaksanaan perannya kepada MDN selaku pembina TKPKD dengan tembusan TNP2K untuk dapat dipantau secara intensif.



**DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**



**TERIMA
KASIH**

MARI BERSINERGI MEMBANGUN NEGERI

WAKI BEKSI MENGI WAWYKUNU NEGERI